



Dipa Nusantara Aidit: Titik Balik PKI dalam Pemilu 1955

Aldi Hendra Pratama,^{1*} Rhoma Dwi Aria Yuliantri,¹ Aman¹

¹Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

*aldihendra0126@gmail.com

Dikirim: 13-06-2025; Direvisi: 03-11-2025; Diterima: 03-11-2025; Diterbitkan: 13-11-2025

Abstrak: Bangkitnya PKI dan menjadi pemenang partai ke-4 dalam Pemilu pertama tahun 1955 didasarkan kepada usaha yang masif. Bagaimana tidak, pada tahun 1948 PKI gagal melakukan pemberontakan di Madiun dan namanya tercoreng dan para pemimpinnya menjadi buronan. Meskipun tidak dibubarkan, membangun partai ini kembali dari posisi ini tidaklah mudah. Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk menganalisis strategi yang digunakan Dipa Nusantara Aidit untuk mengembalikan PKI dan turut berperan dalam perpolitikan Indonesia. Tahapan dalam metode ini adalah 1) penentuan topik; 2) heuristik atau pengumpulan data maupun informasi yang relevan; 3) verifikasi atau kritik sumber yang menguji keabsahan, keaslian, dan kredibilitas sumber yang dikumpulkan; 4) interpretasi atau penafsiran dalam bentuk analisis dan sintesis data; serta 5) historiografi atau penulisan narasi sejarah berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan. Melalui program-program revolusioner di bawah kepemimpinan Dipa Nusantara Aidit sebagai Sekretaris Jenderal, PKI menguatkan pondasi pada pemilu 1955 dengan perolehan 39 kursi di parlemen dan 80 kursi di konstituante. Strategi-strategi tersebut adalah menata ulang partai, pembentukan front nasional, pemberdayaan petani, aktif mendukung pemerintahan, perluasan pendidikan, hingga menjalin kedekatan dengan Soekarno dan PNI.

Kata Kunci: Dipa Nusantara Aidit; Pemilu 1955; PKI; strategi

Abstract: The resurgence of the Indonesian Communist Party (PKI) and its emergence as the fourth-largest party in the first general election of 1955 was founded upon a massive and strategic effort. This achievement is particularly notable considering the party's failure in the 1948 Madiun rebellion, which severely tarnished its reputation and rendered its leaders fugitives. Although the party was not officially disbanded, rebuilding it from such a compromised position was a formidable challenge. This study employs a historical method to analyze the strategies utilized by Dipa Nusantara Aidit in revitalizing the PKI and enabling its active participation in Indonesian politics. The methodological stages include: (1) topic determination; (2) heuristics, involving the collection of relevant data and information; (3) source verification or criticism to assess the validity, authenticity, and credibility of the collected sources; (4) interpretation through analysis and synthesis of data; and (5) historiography, which entails the writing of a historical narrative based on the discovered facts. Under the revolutionary programs led by Dipa Nusantara Aidit as General Secretary, the PKI consolidated its foundation in the 1955 election by securing 39 seats in parliament and 80 seats in the Constituent Assembly. The strategies implemented encompassed party reorganization, the formation of a national front, empowerment of peasants, active support of the government, expansion of educational initiatives, and fostering close relations with President Soekarno and the Indonesian National Party (PNI).

Keywords: Dipa Nusantara Aidit; Election of 1955; PKI; political strategy



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Di bawah kepemimpinan Musso, Partai Komunis Indonesia atau sering disebut PKI pernah melakukan pemberontakan di Madiun pada tanggal 18-30 September 1948 (Susatyo, 2008). Gerakan ini dilatarbelakangi oleh hasil dari perjanjian Renville tanggal 8 Desember 1947 di atas kapal USS. Renville yang berlabuh di Tanjung Priok. Indonesia mengirimkan perwakilan Amir Syarifuddin sebagai perdana menteri ditemani oleh Ali Sastromidjojo sebagai wakil, Sutan Sjahrir, Tjoa Sek Ien, Ir. Djuanda, serta Mr. Narsoen (Nasution, 1978). Hasil Perjanjian Renville dinilai sangat merugikan Indonesia sehingga pemerintah menapat reaksi negatif dari Partai Masyumi dan PNI yang mengutuk secara tegas turut menarik para menteri dari kabinet. Blokade ekonomi yang dilakukan Belanda, harga yang meroket tinggi, sulitnya logistik untuk pemuda yang berjuang digaris depan hingga luasnya penyebaran wabah penyakit semakin memperburuk situasi ini. Akhirnya ketidakstabilan politik, ekonomi, dan sosial ini mengharuskan Amir Syarifuddin mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri yang kemudian diganti oleh Moh. Hatta dengan kabinet presidensial atau pemerintahan yang lebih nasional dan melibatkan semua partai besar (Ubaidillah, 2023).

Pemerintah kala itu lebih memilih pendekatan diplomasi dalam menangani masalah dengan Belanda, berbeda dengan kaum komunis yang menginginkan rakyat termasuk petani dan buruh bangun mengangkat senjata untuk melawan. Perbedaan pandangan politik dan jatuhnya kabinet Amir ini memunculkan kelompok besar oposisi. Setelah Musso kembali dari Moscow, kelompok oposisi pemerintah ini yang terdiri dari PKI, SOBSI, Pesindo, PS, dan PB bergabung dengan Front Demokrasi Rakyat (FDR). PKI sebelumnya menjadi partai bawah tanah yang melawan fasisme secara bergerilya serta menyusup ke pemerintahan dan organisasi lain yang kemudian berlindung di bawah FDR (Dhyatmika, 2011). Setelah seminggu kembali ke Indonesia, Musso dalam Rapat Politburo (biro politik tertinggi komite partai komunis) PKI meminta salinan naskah dan revisi gerakan partai. Hasilnya adalah gerakan buruh dan miskin semua disatukan dan partai-partai yang terlibat digabung menjadi Partai Komunis Indonesia pada tanggal 21 Agustus 1948 (Afrianto et al., 2024).

Sebulan kemudian pada tanggal 18 September 1948, kelompok ini memproklamasikan berdirinya Negara Soviet Indonesia setelah menaklukkan Madiun (Suryadi, 2018) dengan mengusir dan membunuh tentara-tentara nasional. Berita ini langsung terdengar dan pemerintah segera mengambil tindakan dan menganggap gerakan FDR/PKI ini merupakan pemberontakan terhadap pemerintah dan mengutus Jenderal Sudirman untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di Madiun dan daerah sekitarnya. Para pasukan tentara Indonesia banyak yang mengejar pasukan pemberontak yang meloloskan diri dari Madiun yang dapat direbut kembali. Namun, dalam pelarian dirinya pasukan pemberontak banyak melakukan ribuan pembunuhan baik dipotong leher maupun ditembak dari jarak dekat. Korbannya meliputi pimpinan PNI, Masyumi, Pamong Praja, Pamong Desa, tentara pelajar, pengikut Tan Malaka, hingga warga sipil (Dimjati, 1951a). Hal ini semakin memicu tentara untuk segera mengakhiri pemberontakan ini. Musso yang melarikan diri ke Ponorogo ditembak mati pada tanggal 31 Oktober 1948. Pemberontakan ini berakhir setelah pasukan Amir menyerahkan diri pada tanggal 29 November 1948 karena terus dikejar oleh pasukan tentara Indonesia selama berbulan-bulan. Petinggi FDR seperti Amir Sjarifuddin, Maruto Darusman, Djokosujono, Suripno, dan yang lainnya dipenjara bersama sekitar 35.000 simpatisan PKI di Yogyakarta.

Menurut Dimjati (1951), sebagian tawanan dilepaskan karena adanya Agresi Militer Belanda II dan diharapkan dapat membantu melawan tentara Belanda. Kemudian 11 orang yang sangat berpengaruh seperti Amir Sjarifuddin, Maruto Darusman, Suripno, Djokosujono, Gey Gee Hwat, D. Mangku, Harjono, Sardjono, Ronomarsono, Sukarno, dan Katamhadi dijatuhi

hukuman mati di Kabupaten Karanganyar, Surakarta pada 19 Desember 1948. Sedangkan tokoh seperti Dipa Nusantara Aidit (D. N. Aidit), Nyoto, dan Lukman dilepaskan.

Kegagalan PKI dalam pemberontakan ini menjadi sebuah bumerang yang merusak citra dan menurunkan perkembangan partai. Infrastruktur organisasi yang belum matang juga turut menghancurkan kekuatan partai yang sedang dikembangkan (Fathul Bari, 2008). D. N. Aidit harus mengasingkan diri bersembunyi di Priok, Jakarta namun diisukan oleh orang-orang komunis lain dia pergi ke China. Hal ini guna menghindari pengejaran tentara nasional ataupun polisi Belanda. Selain itu, PKI sudah tidak dianggap sebagai ancaman politik setelah ditumpasnya para pemimpin radikalnya dan pemerintah lebih terfokus pada agresi militer Belanda II. Jadi setelah peristiwa Madiun dari tahun 1948 sampai 1949 PKI benar-benar tidak ada gerakan dan vakum meskipun tidak dibubarkan oleh pemerintah (Firdausi, 2020).

Melihat keterpurukan yang dialami oleh PKI ini tidak heran apabila banyak yang berpendapat bahwa PKI ini sudah tidak memiliki daya. Namun ternyata, PKI kembali muncul dengan basis-basis keanggotaan yang memiliki akar cukup besar di bawah kepemimpinan D. N. Aidit (Soedarmo, 2014). Bahkan, pada Pemilu 1955 PKI menjadi partai dengan suara terbanyak keempat dengan 90% anggotanya berbasis di Jawa (Ricklefs, 2007).

Penelitian tentang D. N. Aidit memang telah dilakukan sebelumnya, misalnya tulisan Utomo & Abdurakhman (2021) yang membahas tentang kondisi sosial-politik yang menjadi latar belakang perjuangan Aidit dalam PKI. Kemudian ada penelitian Lin & Galway, (2023) yang mengaitkan pengaruh Maoisme terhadap gagasan Aidit yang dijadikan sebagai dasar dan visi besarnya. Sedangkan dalam tulisan Mark Winward (2018) berfokus pada pemberantasan PKI yang dilakukan pada pertengahan 1960an setelah menjadi tersangka pembunuhan masal dan perdebatan abadi. Namun, penelitian tentang strategi aidit mempertahankan eksistensi bahkan meningkatkan dominasi PKI di tengah perpolitikan Indonesia masih belum ada. Penelitian ini diambil dari sumber sezaman yang merekam secara langsung strategi yang dilakukan oleh Aidit. Ditambah, susahny mencari referensi tentang D. N. Aidit ini menjadi pendukung mengapa tulisan ini harus ada.

Kajian ini bertujuan untuk melihat strategi yang dilakukan oleh Dipa Nusantara Aidit sebagai Sekjen PKI yang menggantikan golongan tua Tan Ling Djie dan Alimin. Tahun 1950 menjadi titik awal penelitian yang mengacu pada dibangunnya kembali PKI di bawah kepemimpinan Aidit dan tahun 1955 menjadi titik akhir penelitian sebagai bukti kesuksesan strateginya dalam Pemilu 1955.

Menurut hasil studi Arnold J. Toynbee (1974), tindakan-tindakan dinamis yang terjadi merupakan bentuk reaksi terhadap tekanan-tekanan yang ada. Sejarah terbentuk karena adanya *stimulus of Blows* atau distimulasi oleh tekanan. Dalam teorinya *Challenge and Respons* perkembangan terjadi akibat dari tantangan yang dihadapi sebagai bentuk respon. Sebagai partai dan gerakan yang gagal dalam pemberontakan, PKI memiliki tantangan besar yang dihadapi untuk membangun ulang partai. D. N. Aidit sebagai Sekjen baru PKI setelah peristiwa pemberontakan mampu membawa partai menjadi salah satu pemenang pemilu 1955 dalam waktu singkat. Sehingga melalui makalah ini, peneliti berusaha menggali usaha-usaha yang dilakukan D. N. Aidit sebagai bentuk respon dari tantangan yang dihadapi partai dari titik terendah hingga akhirnya memiliki pengaruh kuat dalam parlemen.

Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji dan diteliti, penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan sumber studi pustaka. Menurut Kuntowijoyo (2005), terdapat lima tahap dalam penelitian sejarah, yaitu pemilihatn topik, pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik, intepretasi, dan historiografi. Tahap pemilihan topik didasarkan kepada bukti suksesnya

PKI dalam Pemilu pertama tahun 1955 yang terpaut tidak jauh dari jatuhnya nama PKI setelah pemberontakan di Madiun. Heuristik merupakan tahap dalam menemukan dan menghimpun informasi, sumber serta jejak masa lampau yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku-buku Karya D. N. Aidit, Surat Kabar sezaman, Buku Seri Tempo, hingga buku sejarah militer sebagai sumber primer dan jurnal maupun artikel sebagai sumber pendukung. Setelah sumber data terkumpul, proses verifikasi atau kritik sumber dilakukan untuk menguji keaslian atau autentisitas dan kredibilitas informasi yang disampaikan dari sumber yang digunakan. Kemudian ada tahap interpretasi atau penafsiran untuk menganalisis data-data dengan menganalisis dan mensintesis data tentang strategi D. N. Aidit dalam memenangkan Pemilu 1955 yang menjadi sebuah fakta. Terakhir adalah historiografi, yakni penulisan kronologi dan narasi sejarah dengan menggabungkan dan menghubungkan fakta-fakta yang ditemukan sebagai penyajian penelitian dalam bentuk tulisan.

Hasil Penelitian

Mengenal Dipa Nusantara Aidit

Dengan nama asli Achmad Aidit, Dipa Nusantara Aidit lahir di Jalan Belantu No.3 Pangkalalang, Tanjungpandan, Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 30 Juli 1923. Ia lahir dari seorang ayah yang bernama Abdullah Aidit dan ibunya bernama Mailan yang merupakan keluarga terpandang golongan ningrat. Kakeknya memiliki gelar Ki Agus (KA) dengan nama Ki Agus H. Abdul Rachman dan Nyanyu Aminah. D. N. Aidit memiliki tiga orang adik yang bernama Basri Aidit, Ibrahim Aidit yang meninggal saat kecil, dan Murad Aidit (Aidit, 2005). Ayahnya bekerja sebagai pegawai *Boschwezen* sebagai mantri kehutanan (Aulia et al., 2019).

Achmad Aidit tumbuh dalam lingkungan yang agamis dan didik secara islami. Dia dikenal sebagai anak yang alim, pandai mengaji, dan rajin ke masjid. Setiap pulang sekolah pamannya yang bernama Abdurrachim selalu mengajari dan membimbingnya belajar mengaji (Raditya, 2022). Dalam *Catatan Spiritual di Balik Sosok Sobron Aidit* yang dikutip Majalah Historia (Sitompul, 2024) adik tiri Achmad Aidit yang bernama Sobron menyangkal tuduhan kalau Achmad ateis atau tidak beragama. Dia mengatakan bahwa dirinya dan saudara-saudaranya dibesarkan dalam keluarga beragama yang taat beribadah, bahkan sampai khatam Al-Qur'an.

Setelah lulus *Holland Inlandsche School* tahun 1936, Achmad Aidit merantau ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan menengah di *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO). Namun setibanya disana, pendaftaran sudah tutup dan dia harus puas melanjutkan di *Middestand Handel School* (MHS) yang merupakan sekolah dagang di Jl. Sabang, Jakarta Pusat. Aidit sangat aktif mengikuti kegiatan luar sekolah dengan bergabung bahkan menjadi ketua umum Persatuan Timur Muda (Pertimu) yang dibuat oleh Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) di bawah pimpinan Amir Sjarifuddin dan Dr Adenan Kapau Gani. Melesat karir politiknya ini mengisiasi dia untuk terlepas dari bayang-bayang keluarga di Belitung. Sehingga berdasarkan perhitungan politiknya termasuk resiko dia mengganti nama Dipa Nusantara yang disingkat D. N. karena dia sangat mengidolakan Pangeran Diponegoro.

Di Menteng 31, Jakarta tahun 1943, D. N. Aidit bertemu dengan Mohamad Hakim Lukman yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Merdeka. Saat itu Aidit berusia 23 tahun dan kemudian berhasil menjadi ketua dewan politik gerakan ini. Pada 1944, mereka terpilih dalam Barisan Pelopor Indonesia yang berisi 100 pejuang setia kepada Soekarno. Aidit dan Lukman memilih jalan komunis dengan berguru pada para tokoh komunis senior. Ketika di Menteng mereka berkontak dengan Widarta, seorang penanggungjawab organisasi bawah tanah PKI Jakarta. D. N. Aidit juga dekat dengan Wikana yang aktif memimpin PKI di Jawa Barat yang berjuang di bawah tanah.

Menurut Seri Buku Tempo *Dua Wajah Dipa Nusantara Aidit* (Tim Liputan Khusus Tempo, 2015) kedatangan Musso memberikan kesan gairah kepada D. N. Aidit. Gagasan “Jalan Baru bagi Republik” yang ingin menyatukan seluruh kekuatan sosialis-komunis menarik perhatiannya. Bagi Aidit Musso memberikan janji aksi yang bukan sekedar angan-angan revolusi. Diapun memperoleh berbagai kepercayaan di PKI seperti menjadi Ketua Fraksi PKI pada 1947, anggota Komisi Penterjemah PKI 1948 yang menerjemahkan karya Karl Marx dan F. Engels *Manifesto Partai Komunis*, menjadi anggota Komite Central PKI tahun yang sama dimana dia ia mengurus bagian agraria. Pada tahun yang sama pula D. N. Aidit mendapat tugas sebagai koordinator seksi Perburuan Partai yang merupakan posisi strategis. Namun tak berselang lama dia menjabat posisi ini, gerakan Revolusi Madiun pada 18 September 1948 yang diinisiasi Musso meletus. Aidit sempat ditangkap namun bisa melarikan diri dengan menyamar sebagai pedagang Cina dan memalsukan berita dia pergi ke Cina tahun 1949 untuk memalsukan dan menyamarkan dirinya.

Dalam buku Pusat Sedjarah Militer Angkatan Darat (1966), D. N. Aidit melihat kegagalan Musso dalam memimpin revolusi di Madiun dikarenakan para pemimpin FDR/PKI tidak memanfaatkan kesempatan dengan baik sejak kemerdekaan Indonesia. Mereka melewatkan kesempatan dalam mempengaruhi para tenaga bersenjata dan kurang intensifnya membangun partai serta mengkoordinasi revolusi. Kekurangan kesadaran dan terlambatnya inisiasi mempengaruhi tenaga bersenjata membuat gerakan dan pembangunan partai terbatas sehingga terlambat dalam pembangunannya. Alhasil kekuatan bersenjata ini justru menjadi penghalang terbesar dan berhasil menggagalkan gerakan komunis ini.

Menata Ulang Partai

Dikutip dari buku D. N. Aidit yang berjudul *Lahirnya PKI dan Perkembangannya 1920-1955* (Aidit, 1955) kekalahan dalam revolusi Madiun memang menjadi pukulan keras bagi PKI. Menurut D. N. Aidit, hal ini terjadi karena belum siapnya PKI penyelenggaraan Front Persatuan yang kurang matang. Pengalaman dalam perjuangan bersenjata juga mempengaruhi perkembangan partai. Selain itu, hubungan yang masih saling curiga antara PKI dan kaum menengah ke atas (borjuis) dalam revolusi juga sangat berpengaruh.

Melalui Pleno Central Komite tahun 1951 yang dipimpin oleh Tan Ling Djie, PKI berhasil menyusun rencana Konstitusi PKI yang akan kembali dengan konsep “jalan baru” yang digagas Musso sebagai Anggaran Dasar PKI yang disetujui oleh mayoritas anggota. Pada waktu itu, Aidit mewakili golongan muda yang didukung oleh Wikana, Lukman, dan Njoto. Bersama Politbiro baru dengan lima anggota seperti termasuk Aidit, Lukman, Njoto, Sudisma, dan Alimin terpilih dalam komite sentral ini. Aidit menduduki posisi sekretaris pertama dan Sudisman menjadi pimpinan Sekretariat Komite Sentral atau Sekretaris Jenderal PKI yang mendukung tiga Serangkai Aidit, Lukman dan Njoto.

Sebelumnya dalam komite itu Aidit memberikan gagasan dalam menanggapi peristiwa Madiun dan menginisiasi pembentukan front nasional dengan menggandeng partai PSI (Partai Sosialis Indonesia) dan MURBA atau Musyawarah Rakyat Bawah (Ramadhan, 2012). Terbentuknya Front Persatuan Nasional yang bekerjasama dengan kaum menengah ke atas secara nasional ini mampu memberikan peluang bagi perkembangan partai dan menghimpun sekutu dari kaum tani dan buruh yang anti-feodalisme. Persekutuan kaum buruh dan tani ini menjadi dasar perjuangan seluruh rakyat dalam revolusi kelas baik perjuangan tani untuk tanah, kaum inteligen atas hak-haknya, kaum borjuis nasional melawan persaingan asing hingga usaha rakyat untuk kemerdekaan demokratis. Aidit mendeklarasikan pembentukan front persatuan nasional pada 11 Mei 1951.

Pada tahun 1952, PKI menggelar konferensi nasional yang membicarakan keputusan politiknya terhadap kabinet Sukiman yang berujung harus dijatuhkan. PKI juga mengambil sikap terhadap DI-TII yang melakukan teror di Jawa Tengah dan Jawa Barat dan dianggap sebagai alat kaum imperialis dalam negeri untuk mematikan semangat gerakan revolusioner rakyat. Kekuatan PKI, aparat negara, dan partai-partai lainnya dikerahkan untuk menumpas gerombolan DI-TII. Konferensi ini juga memutuskan untuk memperkuat ideologi dan organisasi serta memperluas keanggotaan partai.

Dalam sidang Centra Komite 1953, resolusi khusus ditujukan kepada Tan Ling Djie yang sudah berkuasa di dalam partai selama periode 1945-1948 dan pada awal 1951. Tan Ling Djie dianggap berideologi subjektivisme dengan aliran dogmatis dan empiris di dalam partai. Pandangannya membuat partai banyak melakukan kesalahan dan merusak pertumbuhan serta gerakan revolusioner partai. Bahkan sejak kembalinya Aidit dan Lukman dari pelarian pada tanggal 15 Agustus 1950 yang bekerja di Sekretariat Agitasi dan Propaganda Politbiro mendapatkan tempat dihalangi oleh Tan Ling Djie. Melalui sidang ini juga Aidit berhasil menduduki jabatan tertinggi sebagai Sekretaris Jenderal PKI dimana Lukman dan Njoto menjadi wakilnya.

Pada Kongres Nasional V PKI pada Maret 1954, PKI sudah memiliki anggota partai dengan yang memiliki suara sebanyak 49.042 orang yang terhitung sejak tahun 1951. Pleno Central Komite Ke-2 diselenggarakan pada bulan November 1954 dan membahas tentang upaya untuk memperluas front persatuan dimana PKI saat itu sudah menjadi salah satu kekuatan nasional yang cukup besar. PKI lebih aktif menjalin kerjasama dengan partai lain seperti partai Nasional dan Islam yang tidak dibatasi hingga diselenggarakannya pemilihan umum.

Pembentukan Front Nasional

Dalam buku karya Donald Hindley yang berjudul *The Communist Party of Indonesia 1951-1963* (Hindley, 1966) menjelaskan bahwa selain menyatukan partai-partai sosialis di bawah satu naungan dan mengganti golongan tua yang tidak sejalan dengannya pada tahun 1950an, Aidit menginisiasi pembentukan Front Persatuan Nasional. Faktornya karena pertama, akibat gagalnya PKI dalam pemberontakan Madiun, Moscow sudah tidak berminat untuk melihat komunis di Indonesia. PKI dianggap sudah tidak berdaya dan jauh dari kata layak untuk memperoleh perhatian. Kedua, merupakan upaya dari D. N. Aidit sendiri yang mencoba untuk menyesuaikan konteks politik dan masyarakat Indonesia sendiri sehingga bentuknya khas dan cukup berbeda dari rumusan Mao Tse-Tung.

Pada tahun 1951, setelah menganalisis bahwa kebijakan PKI sejauh ini belum bisa membawa PKI lebih dekat dengan pemerintah. Maka disusunlah front yang memiliki program nasional dan dapat diterima secara luas serta menari untuk orang-orang yang berpandangan progresif dan anti-imperialis. Pembentukan front ini dari bawah sehingga anggota partai maupun bukan asal memenuhi syarat setuju terhadap program ini maka dapat bergabung. Komite-komite dibentuk di pusat dan daerah yang anggotanya dipilih melalui demokrasi. Pada bulan Agustus 1951, Aidit menyatakan bahwa Front persatuan harus terdiri dari front buruh, front tani, front kebudayaan, front mahasiswa, front pemuda, front wanita, front rakyat miskin kota, front mantan pejuang bersenjata, front perjuangan, front persatuan partai, front Irian, hingga front industrialis. Langkah awal ke arah partai massa pada bulan 1952 kampanye dilaksanakan untuk meningkatkan jumlah anggota partai dari 7.910 menjadi 100.000 orang.

Tugas utama PKI dalam front persatuan ini sendiri tidak dapat dipisahkan dari tujuan untuk 1) membangun PKI menjadi partai massa yang teratur dan disiplin. 2) menarik, memobilisasi, mengorganisasi, dan memimpin tiga kelas yang paling revolusioner dan melakukan hal yang sama pada elemen lain dalam masyarakat yang masih rentan. Dan 3)

mendapatkan toleransi serta kerja sama sebanyak-banyaknya dari kekuatan politik yang pro-komunis.

Pemberdayaan Petani

Melalui bukunya yang berjudul *Kaum Tani Mengganjang Setan-Setan Desa*, D. N. Aidit memberikan perhatian khusus terhadap gerakan tani. Perhatian dari PKI ini dituangkan dalam bentuk riset yang memang dipadukan dengan kegiatan organisasi dan politiknya. Sejak tahun 1951, metode riset sudah digunakan dalam menganalisis permasalahan agraria, kaum dan gerakan tani melalui interview, angket, dan menyebarkan formulir yang berisi pertanyaan. Selain itu kontak secara langsung dengan massa kaum petani ini juga memberi hasil mengenai catatan perasaan dan pikiran kaum tani mengenai kepemilikan tanah.

Hasilnya, penelitian ini mampu meringankan dan memperbaiki pekerjaan partai dikalangan kaum tani. Para petani merasa bahwa semboyan “hak negara atas semua tanah” adalah salah dan dianggap sebagai usaha merampas tanah para petani. Mereka menginginkan kepemilikan tanah atas kaum petani. Dengan munculnya kesadaran ini, maka tidak heran anggota organisasi petani BTI-RTI yang sebelumnya pada tahun 1953 seluruhnya berjumlah 400.000, pada tahun 1964 angkanya sudah mencapai 7 juta anggota.

Aidit menginginkan sebuah revolusi yang tidak hanya menghapus kepemilikan alat produksi rakyat milik perorangan. Namun juga ingin mempertahankan dan memberikan alat produksi termasuk tanah secara Cuma-Cuma kepada kaum petani dalam bentuk revolusi Agraria. Alat-alat pertanian milik kaum kapitalis asing harus disita sebagai bentuk sifat nasional yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis rakyat ini harus bertindak secara diktator kepada para musuh rakyat seperti imperialis, reaksioner, dan makelar tanah feodal (D. N. Aidit, 1959). Di Indonesia kala itu memang belum ada golongan tuan tanah yang cukup besar skalanya, namun menurut Aidit justru hal ini yang mengakibatkan “penghisapan” kepada kaum tani semakin intensif. Belum lagi jumlah tuan tanah yang sangat banyak sehingga para petani bisa diibaratkan seperti bola pingpong yang selalu dipukul oleh kaum “penghisap” kemanapun dia lari (D. N. Aidit, 1964).

Bahkan menurut Aidit, setelah kapitalisme masuk ke Indonesia, feodalisme mulai terdegradasi namun masih banyak meninggalkan sisa-sisa yang cukup signifikan dirasakan oleh petani. 1) hak memonopoli yang tetap berlanjut oleh para tuan tanah, akibatnya para petani tidak dapat memiliki tanah dan harus menyewa tanah sesuai ketentuan pemilik tanah secara terpaksa. 2) sebagian besar hasil panen dalam bentuk barang yang harus dibayarkan sebagai sewa tanah sehingga petani tetap dalam kemiskinan. 3) pembayaran sewa tanah juga dapat berupa pekerjaan di tanah pemilik tanah, kebijakan ini membuat mayoritas petani terbelenggu dalam sistem perbudakan. 4) Utang besar mayoritas petani akibat semena-menanya tuan tanah juga menempatkan para petani ke dalam perbudakan oleh tuan tanah.

Kesadaran betapa pentingnya peranan kaum tani semakin dirasakan oleh semua golongan dan masalah ini sudah diakui secara luas dan menjadi masalah pokok dalam negeri. Aidit menganggap bahwa masalah tani selalu berhubungan dengan masalah-masalah besar lain dalam upaya penyelesaiannya. Tidak hanya menurut PKI, dalam dokumen-dokumen resmi pemerintah pun sudah ditekankan bahwa perkebunan dan pertanian memegang kunci sentral yang menopang perekonomian negara dan kaum tani diakui sebagai *sokoguru* Revolusi Indonesia bersama kaum buruh.

Aktif Mendukung Pemerintah

Setelah Pleno Central Komite pada tahun 1951, PKI mulai berbenah untuk mengembangkan partai dengan dua tugas pokok yakni menggalang front persatuan dan membangun partai. PKI pernah dijegal kembali oleh Kabinet Sukiman dari Masyumi karena membangun kembali gerakan yang revolusioner. Provokasi Solo dan Madiun digunakan hingga membuat peristiwa serangan di Tanjung Priok sebagai ulah PKI. Sehingga sekitar 2000 orang komunis yang progresif dijebloskan ke penjara melalui Razia Agustus. Namun karena didesak oleh rakyat, orang-orang yang dipenjara dibebaskan dan menunjukkan gerakan revolusioner di Indonesia masih memiliki kekuatan.

Dalam Konferensi Nasional 1952, PKI membahas sikap yang akan diambil terhadap kabinet Sukiman. Keputusannya adalah pemerintahan Sukiman harus dijatuhkan dengan menarik golongan borjuis nasional dan membentuk front anti pemerintah Sukiman. DI-TII yang waktu itu sedang melaksanakan aksi terornya dianggap sebagai alat kaum imperialis dan reaksioner (Kabinet Sukiman) untuk mengancurkan semangat dan gerakan revolusioner. Namun DI-TII dapat ditumpas dan pemerintahan Sukiman harus turun pada tanggal 1 April 1952.

Kabinet Sukiman kemudian diganti oleh pemerintahan Wilopo dari PNI yang didukung oleh PKI karena politiknya dianggap lebih maju. Dalam pemerintahan yang baru ini, banyak menteri yang berasal dari PSI dan Masyumi. Namun karena Masyumi dan PSI dianggap anti rakyat dan dinilai tidak berani menentang serta menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia anti imperialis & cinta damai dalam front internasional. Maka dengan mayoritas demokratis termasuk PNI menjatuhkan Kabinet Wilopo dan digantikan Kabinet Ali Sastroamidjojo dari PNI tanpa mengikutsertakan Masyumi dan PSI pada tanggal 30 Juli 1953.

Melihat hal ini, PKI yang sebelumnya mendukung pemerintah Wilopo dalam parlementer menyatakan bahwa parlemen bukanlah fokus utama dari pekerjaan partai. Namun PKI juga tidak mengabaikan parlementer sebagai tanggungjawab politiknya. Partai bisa menjadi oposisi pemerintah dan siap menggulingkannya, partai juga bisa mendukung pemerintah dan ikut andil. Dalam kasus ini, PKI ambil peran untuk tetap mendukung kabinet Ali Sastroamidjojo.

Perluasan Pendidikan

Setelah pengambilalihan partai dari golongan tua pada tahun 1951, Aidit berhasil melakukan konsolidasi dan menyatukan unsur-unsur yang mendukung garis kebijakan baru partai. Meskipun melalui proses yang panjang dengan perdebatan mulai dari pimpinan pusat hingga kader-kader daerah, namun Aidit dapat mulai membanun struktur organisasi yang cukup ketat. Perekrutan anggota lebih ditata dimana setiap calon anggota sebelum menjadi anggota penuh dan kader partai harus melalui tahap pemeriksaan dan pengawasan selama lima hingga enam bulan. Pada proses ini, asas demokrasi juga diberlakukan dimana para kader dapat menyuarakan pendapat dan kritik yang berbeda agar tidak terkumpul hingga menjadi fraksi seperti sebelumnya.

PKI juga memberikan perhatian khusus pada pendidikan politik yang membuat banyak orang terkesan. Dalam sistem pendidikan nasional yang belum berkembang dan terbatasnya sekolah serta tenaga pengajarnya, dapat dimanfaatkan oleh PKI untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan di berbagai tingkat. Jalan menuju modernitas, studi ekonomi politik, Analisis Marxis, hingga sejarah masyarakat diajarkan di sekolah maupun kursus politik binaan partai. Perluasan pendidikan ini tidak hanya menawarkan isi namun juga cara “berilmu yang baru”.

Kegiatan penyiaran melalui surat kabar juga turut mendukung pendidikan ini. Surat kabar *Harian Rakjat* yang awalnya hanya terbatas untuk anggota partai dan kader kemudian menjadi harian yang bahkan pada tahun 1957 tersebar 60 ribu eksemplar.

Aliansi dengan Soekarno dan PNI

Untuk memperkuat PKI, Aidit beraliansi dengan Partai Nasional Indonesia (PNI). PNI yang anti-barat beserta figur Soekarno dapat memberikan manfaat dalam mengatasi tekanan lawan politik PKI. Bahkan PNI di bawah masa Sidik Djojokusarto menyepakati bahwa dalam rangka pembangunan partai, PNI tidak akan mengganggu PKI. Dalam Koran terbitan *Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant* tanggal 13 April 1957 D. N. Aidit bersama partainya telah berjanji untuk memberikan dukungan penuh kepada Kabinet Presiden Soekarno untuk mewujudkan demokrasi terpimpin. Dalam pidatonya yang dikutip oleh Koran *Deventer Dagblad* tanggal 6 Agustus 1957 Aidit memberi tanggapan dan dukungan terhadap Presiden Soekarno untuk demokrasi terpimpin. Menurutnya dalam kampanyenya di Sukabumi, Jawa Barat PKI berjuang bersama-sama dengan partai dan organisasi yang “demokratis” untuk mencegah runtuhnya republik. Kerjasama ini antara PKI dan PNI yang nasionalis serta Nahdlatul Ulama yang nantinya akan dihadapkan kepada pilihan antara membentuk front anti-komunis bersama dengan Masyumi atau mewujudkan rencana Soekarno untuk membentuk demokrasi terpimpin.

Keberhasilan Dalam Pemilu 1955

Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama skala nasional yang diadakan oleh Negara Indonesia sejak awal kemerdekaan. Pemilu ini diselenggarakan sebagai jalan keluar atas ketidakpyasan situasi politik secara umum dan diharapkan dapat menguatkan proses perubahan awal Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis dan toleran. Pemilu ini dilaksanakan untuk memilih anggota parlemen dan konstituante yang masing-masing ada 260 kursi dan 520 kursi yang tersedia. Untuk kursi konstituante membutuhkan paling tidak 150.000 suara sedangkan untuk parlemen sekitar 300.000. lebih dari 100 partai, organisasi, maupun perorangan berpartisipasi dengan menawarkan berbagai macam ideologi, platform, dan identitas politik (Winardi et al., 2018).

PKI yang waktu itu merupakan partai pendukung pemerintah dengan program-program anti-kolonialisme dan anti-imperialisme menjadi daya tarik tersendiri dalam memperoleh suara dalam kalangan rakyat. Selain itu, dalam kampanyenya PKI membawa spanduk yang bertuliskan “bagi kaum agama memilih PKI berarti djaminan kebebasan beragama” yang dilengkapi dengan gambar orang-orang yang menggunakan pakaian keagamaan yang berbeda sesuai agama yang ada di Indonesia.

Setelah dilaksanakan pemilu parlemen pada tanggal 29 September 1955, PKI memperoleh suara sebanyak 6.176.914 atau 16,4% dari 37.785.299 suara yang masuk dan menempatkannya di peringkat 4. Di atasnya ada pemenang pemilu yakni PNI dengan suara 8.434.653 atau 22,3% suara, Masyumi dengan suara 7.903.886 atau 20,9%, dan Nahdatul Ulama dengan 6.955.141 atau 18,4% suara. PNI dan Masyumi berhasil memperoleh 57 kursi, NU 45 kursi, PKI 39 kursi, Parkindo dan PSII memperoleh 8 kursi dengan masing-masing memperoleh 1.003.325 atau 2,6% dan 1.091.160 atau 2,9% suara, partai Katolik 6 kursi dengan 770.740 atau 2,0% suara, dan PSI 5 kursi dengan 753.191 atau 2% suara..

Sedangkan untuk konstituante, PKI tetap menjadi pemenang keempat dengan 6.232.512 atau 16,47% suara. PNI masih menduduki posisi pertama dengan 9.070.218 atau 23,97% suara, Masyumi 7.789.619 atau 20,59% suara, NU 6.989.333 atau 18,47% suara. Masing-masing memperoleh kursi PNI 119 kursi, Masyumi 112 kursi, NU 91 kursi, PKI 80 kursi, dan PSII 16 kursi dengan suara 1.059.922 atau 2,80%.

Prestasi PKI tidak hanya itu, di Jawa Tengah PKI menjadi pemenang kedua dengan suara di parlemen sebesar 2.305.041 suara dan konstituante dengan 2.305.041 suara. PKI menang di Surakarta, Yogyakarta, dan Semarang dengan persaingan yang sangat sengit melawan PNI. Di

Yogyakarta sendiri yang saat itu masih menjadi bagian Jawa Tengah, PKI keluar sebagai pemenang utama dengan suara hingga 237.000 yang disusul oleh PNI dengan 207.000 suara.

Melihat dinamika usaha Partai Komunis Indonesia di bawah kepemimpinan D. N. Aidit ini memberikan gambaran bahwasanya revolusi internal partai, mengedepankan pendidikan dan riset, serta bersinergi dengan masyarakat dapat membawa arah kepada kemajuan. Tanpa menghilangkan tragedi yang telah terjadi pada peristiwa G30SPKI, patut mengapresiasi usaha-usaha yang telah dilakukan oleh PKI dalam memperoleh kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi dan signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Nilai-nilai humanisme harus selalu diangkat dan menjadi dasar utama dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat sehingga dapat berjalan dengan beriringan dan saling mendukung demi keutuhan bangsa di masa depan.

Kesimpulan

Gagalnya PKI dalam pemberontakan di Madiun tahun 1948 memberikan tamparan keras yang merusak dan menurunkan perkembangan partai yang mengharuskan para pemimpin dan kadernya melarikan diri dan menyembunyikan identitasnya. Namun, tidak butuh waktu hingga puluhan tahun, D. N. Aidit beserta para golongan muda mampu mereformasi partai dengan cukup singkat. Dimulai dengan menata ulang partai, pembentukan front nasional, pemberdayaan dan perhatian lebih pada kaum petani, aktif dalam mendukung pemerintahan, perluasan pendidikan, hingga akhirnya beraliansi dengan Soekarno dan PNI yang dapat terlihat dengan jelas tahun 1957 pasca pemilu. Hasilnya PKI berhasil menempati urutan keempat pemenang Pemilu 1955 di bawah PNI, Masyumi, dan NU. Dengan perolehan 39 kursi di parlemen dan 80 kursi di konstituante ini memperlihatkan bahwa strategi yang digagas oleh D. N. Aidit dan dilaksanakan oleh PKI terbukti berhasil dan menguatkan pondasi PKI dalam perpolitikan Indonesia.

Ucapan Terimakasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) yang telah mendukung penelitian ini.

Daftar Rujukan

- Afrianto, M. R., Wibowo, T. U. S. H., & Ribawati, E. (2024). Musso's Role in the PKI Rebellion in Madiun in 1948. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 12(2), 505-516. <https://doi.org/10.24127/hj.v12i2.9681>.
- Aidit, D. N. (1955). *Lahirnja PKI dan Perkembangannja (1920-1955)*. Jajasan Pembaruan.
- Aidit, D. N. (1959). *Introduksi tentang Soal2 Pokok Revolusi Indonesia*. Jajasan Universitas-Rakjat.
- Aidit, D. N. (1964). *Pemetjahan Masalah Ekonomi dan Ilmu Ekonomi Indonesia Dewasa Ini*. Jajasan Pembaruan.
- Aidit, M. (2005). *Aidit, Sang Legenda*. Panta Rei.
- Aulia, M. I., Samsudin, S., & Isana, W. (2019). Peran Dipa Nusantara Aidit pada Peristiwa Berdarah G30s Tahun 1965. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 3(2), 103-120. <https://doi.org/10.15575/hm.v3i2.9171>.
- Bari, A. F. (2008). *Strategi Partai Komunis Indonesia Terhadap Petani*. Skripsi. Universitas Indonesia.
- Dhyatmika, W. (2011). *Muso, Si Merah di Simpang Republik*. Gramedia.

- Dimjati, M. (1951a). *Sedjarah Perdjuaan Indonesia*. Penerbit Widjaja.
- Dinas Sedjarah Militer Angkatan Darat. (1966). *Kontra Revolusi Gestapu PKI*. Dinas Sedjarah Militer Angkatan Darat.
- Firdausi, F. A. (2020). *Usai Peristiwa Madiun, Kelompok Aidit Gerilya Membangun Kembali PKI*. tirta.id. <https://tirta.id/usai-peristiwa-madiun-kelompok-aidit-gerilya-membangun-kembali-pki-f4zq>. Diakses tanggal 13 Mei 2025.
- Hindley, D. (1966). *The Communist Party of Indonesia 1951-1963*. University of California Press.
- Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah* (Cetakan Kelima). PT Bentang Pustaka.
- Lin, H., & Galway, M. (2023). Heirs to What Had Been Accomplished: D. N. Aidit, the PKI, and Maoism, 1950-1965. *Modern Intellectual History*, 20(3), 883–911. <https://doi.org/10.1017/S1479244322000282>.
- Nasution, A. H. (1978). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid V, VIII*. Angkasa.
- Raditya, I. N. (2022). *Biografi DN Aidit: Kecil Khatam Mengaji, Besar Pimpin PKI*. tirta.id. <https://tirta.id/biografi-dn-aidit-kecil-khatam-mengaji-besar-pimpin-pki-f5p1>. Diakses tanggal 13 Mei 2025.
- Ramadhan, L. (2012). *Konflik Ideologi Di Tubuh Partai Komunis Indonesia Periode 1951-1959: Marxis-Leninis Versus Revisionisme Modern*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ricklefs, M. C. (2007). *Sejarah Indonesia Modern*. Gadjah Mada University Press.
- Sitompul, M. (2024). *D. N. Aidit, Petinggi PKI yang Menutup Diri*. historia.id. <https://www.historia.id/article/d-n-aidit-petinggi-pki-yang-menutup-diri-DOyLw>. Diakses tanggal 13 Mei 2025.
- Soedarmo, U. R. (2019). Perkembangan Politik Partai Komunis Indonesia (1948-1965). *Jurnal Artefak*, 2(2), 129-138. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/view/1061>.
- Suryadi, A. (2018). Tentara Republik Indonesia Pelajar Madiun Tahun 1946-1949. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 6(1), 43-51. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/22077>.
- Susatyo, R. (2008). *Pemberontakan PKI-Musso di Madiun 18-30 September 1948*. Koperasi Ilmu Pengetahuan Sosial.
- Tim Liputan Khusus Tempo. (2015). *Dua Wajah Dipa Nusantara Aidit* (ketiga). Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Toynbee, A. J. (1974). *A Study of History*. Dell Publishing Co., Inc.
- Ubaidilah, H. (2023). *Pemberontakan PKI Madiun 1948*. researchgate.net. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20070.80964>.
- Utomo, S. P., & Abdurakhman. (2021). Red steps of a Muazin from belitung. In *Dissecting History and Problematizing the Past in Indonesia* (pp. 295–305). Nova Science Publishers, Inc.
- Winardi, U. N., Salim, M. N., Utama, W. S. U., & Fakhri, F. (2018). *Jogja Memilih Sejarah Pemilu 1951 & 1955 di Yogyakarta*. Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Aldi Hendra Pratama, Rhoma Dwi Aria Yuliantri, Aman
Dipa Nusantara Aidit: Titik Balik PKI dalam Pemilu 1955

Winward, M. (2018). Capture from Below: Civil–Military Relations during Indonesia's Anticommunist Violence, 1965–66. *Indonesia*, 106(1), 111-136.
<https://doi.org/10.1353/ind.2018.0017>.